

**DAFTAR PELANGGARAN YANG DITEMUKAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2021**

Jenis Pelanggaran	Gambaran Umum Pelanggaran	Laporan Penindakan Temuan
Aspek Tugas Pokok dan Fungsi	1 Uraian tugas semua pegawai belum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas	Telah dibuat surat tindak lanjut temuan No. 700/170/III/DPMDes/2022 sebagai perintah kepada Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk menyusun dan membuat uraian tugas masing-masing pegawai di Dinas PMD Prov. Kalteng. Surat Keputusan Kepala Dinas PMD Prov. Kalteng tentang uraian tugas masing-masing pegawai tersebut telah dibuat pada tanggal 10 Januari 2022.
	2 Pegawai fungsional pranata komputer di Dinas PMD Prov. Kalteng tidak membuat DUPAK	Telah dibuat surat tindak lanjut temuan No. 700/171/III/DPMDes/2022 sebagai perintah kepada tiga orang Pegawai Fungsional Pranata Komputer untuk membuat DUPAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	3 Tugas dan fungsi bidang pemberdayaan kemasyarakatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dan bidang pemberdayaan usaha ekonomi desa tidak dilaksanakan	Telah dibuat surat tindak lanjut temuan No. 700/164/III/DPMDes/2022 sebagai pemberian teguran dan instruksi kepada Pengguna Anggaran Dinas PMD Prov. Kalteng untuk lebih tertib, efektif dan transparan dalam menyusun program/kegiatan/sub kegiatan dan dalam pengalokasian anggarannya ke semua bidang berdasarkan tupoksinya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Aspek Pengelolaan Sarana dan Prasarana	4 Pemanfaatan barang milik daerah (BMD) untuk dikelola pihak lain belum tepat	Telah dibuat surat tindak lanjut temuan No. 700/166/III/DPMDes/2022 kepada Pengguna Anggaran Dinas PMD Prov. Kalteng sebagai teguran dan perintah untuk mempedomani ketentuan yang berlaku dalam mengelola aset dalam penguasaannya.
	5 Prosedur pemusnahan barang milik daerah (BMD) belum lengkap	Telah dibuat surat tindak lanjut temuan No. 700/172/III/DPMDes/2022 sebagai teguran dan instruksi kepada Pegawai Pengurus Barang Pengguna untuk melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dalam pemusnahan BMD sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Keuangan dan Aset terkait penelitian/verifikasi terhadap usul pemusnahan BMD.

Aspek Pengelolaan Keuangan	6	Penyerapan anggaran masih rendah	Telah dibuat surat tindak lanjut temuan No. 700/173/III/DPMDes/2022 sebagai perintah kepada semua PPTK pada Dinas PMD Prov. Kalteng untuk memacu percepatan pelaksanaan kegiatan Belanja Langsung sesuai dengan rencana dalam DPPA Dinas PMD Prov. Kalteng T.A. 2021.
	7	Pemberian uang panjar belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Telah dibuat surat tindak lanjut temuan No. 700/174/III/DPMDes/2022 sebagai teguran kepada bendahara keuangan dan dua orang pegawai PPTK untuk lebih mempedomani prosedur dalam pemberian uang panjar.
	8	Biaya perjalanan dinas tidak efisien	Telah dibuat surat tindak lanjut temuan No. 700/175/III/DPMDes/2022 untuk memberikan teguran kepada seluruh PPTK di lingkup Dinas PMD Prov. Kalteng atas kelalaiannya.
	9	Terdapat bukti pengeluaran yang tidak dapat diyakini kebenarannya senilai Rp 8.706.900	Telah dibuat surat tindak lanjut temuan No. 700/176/III/DPMDes/2022 sebagai perintah kepada PPTK untuk menyetor pengeluaran sebesar Rp 8.706.900 ke kas daerah. Dana tersebut telah disetor ke kas daerah pada tanggal 8 Maret 2022.
	10	PPK-SKPD belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku	Telah dibuat surat tindak lanjut temuan No. 700/177/III/DPMDes/2022 sebagai teguran kepada PPK Dinas PMD Prov. Kalteng atas kelalaiannya serta memberikan perintah kepada PPK untuk mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	11	Alokasi anggaran belanja operasional tidak efektif	Telah dibuat surat tindak lanjut temuan No. 700/178/III/DPMDes/2022 sebagai teguran dan instruksi kepada Sekretaris Dinas PMD Prov. Kalteng untuk melakukan efisiensi dalam alokasi anggaran Belanja Langsung pada unit pelaksana sekretariat dan mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang sesuai kewenangan tugas dan fungsinya.

12	Belanja monitoring dan evaluasi pada Sekretariat tidak relevan dengan tugas dan fungsi unit kerjanya	Telah dibuat surat tindak lanjut temuan No. 700/179/III/DPMDes/2022 sebagai teguran kepada PPTK Sekretariat atas kelalaiannya.
----	--	--

Palangka Raya, 04 Juli 2022

Plt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



ARYAWAN, S.IP., M.IP

Penyelia

NIP. 19700514 200604 1 010